

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topic penelitian, yaitu:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Soleman Yelo Bora (2018) berjudul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bunga dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” berfokus pada upaya pengembangan sektor wisata bunga di Desa Sidomulyo, Kota Batu, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengembangan wisata bunga dilakukan, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui Snowball Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Desa Sidomulyo telah berjalan cukup baik, yang ditandai dengan adanya keterbukaan antara pemerintah desa dan masyarakat, ketersediaan tenaga kerja produktif, serta disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan yang mendukung penuh kegiatan pariwisata bunga. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap beberapa kendala yang masih dihadapi, antara

lain minimnya pendampingan dari pihak pemerintah, kondisi lokasi pembibitan yang belum memenuhi standar, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan wisata, serta keterbatasan modal yang menghambat optimalisasi pengembangan destinasi.

- 2) Berdasarkan penelitian terdahulu Dewi Silvia (2019) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan wisata, kurangnya persamaan persepsi diantara implementor serta masih kurangnya hubungan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut pertama, bagaimana implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ?, kedua, bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata situs Astana Gede Kawali yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ?, Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis guna mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan penelitian ini sebanyak 6

orang informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pendapat informan yang menyatakan lebih dari setengah indikator kerja yang diajukan oleh peneliti belum berjalan dengan baik. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kesibukan masing-masing instansi dengan program kebijakannya, keterbatasan pemahaman masyarakat dalam sosialisasi, SDM belum cakupan, keterbatasan jumlah serta kompetensi pegawai, kurang kuatnya will pimpinan, keterbatasan anggaran, terdapatnya egosentris diantara para pelaksana kebijakan, belum adanya regulasi insentif untuk non PNS, sulit mengaplikasikan tugas sesuai SOP ke masyarakat, adanya perbedaan kepentingan, belum ada tata kelola SDM yang sesuai dengan bidangnya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan seperti sharing dengan instansi-instansi terkait, melakukan sosialisasi, memperkuat komunikasi, mengadakan rekrutmen dan pembinaan pegawai, melakukan koordinasi, kerjasama dalam program instansi lain, membuat skala prioritas, menginput kebutuhan pegawai, memberikan informasi yang jelas ke masyarakat, menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang, mengajukan tata kelola SDM ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

3) Berdasarkan Penelitian terdahulu Fina Septivia Sherly Anggraini, Nurul Umi Ati, Taufiq Rahman Ilyas (2023) yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat (studi kasus objek wisata jamun spot sunset desa poncokusumo kabupaten malang). Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dengan isi tujuan kepariwisataan yang diwujudkan melalui kebijakan pengembangan desa wisata dengan partisipasi masyarakat sebagai basisnya. Proses implementasi kebijakan tersebut masih ditemui permasalahan diantaranya kurangnya sumber daya fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, serta struktur birokrasi yang belum maksimal. Hal tersebut melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan desa wisata Poncokusumo yang difokuskan pada objek wisata Jamun Spot Sunset (JSS). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. oleh karena itu, digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan 2 teori. Pertama, teori implementasi kebijakan menurut Edward III dengan 4 indikator. Kedua, partisipasi masyarakat menurut Marschall (dalam Darin, 2022) dengan 3 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan indikator implementasi kebijakan Penelitian yang mengacu

pada teori Edward III serta konsep partisipasi masyarakat menurut Marschall (dalam Darin, 2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan wisata.

Adapun faktor-faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan implementasi tersebut terbagi menjadi dua, yakni:

Faktor internal, seperti solidnya kerja sama antar pemangku kepentingan dan semangat kerja anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Faktor eksternal, meliputi potensi bentang alam dan kekayaan budaya lokal yang mendukung daya tarik wisata.

Sementara itu, beberapa hambatan juga diidentifikasi, baik secara internal, seperti keterbatasan kemampuan komunikasi publik (public speaking) para pengelola wisata, maupun secara eksternal, antara lain kurang memadainya infrastruktur seperti akses jalan, keterbatasan sumber air, dan minimnya dukungan pendanaan.

Perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan terletak pada kerangka teori yang digunakan, fokus analisis, serta lokasi penelitian. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi secara lebih mendalam dinamika implementasi kebijakan pengembangan desa wisata dengan konteks dan pendekatan yang berbeda, yakni pada Desa Wisata Rindu Hati di Kabupaten Bengkulu Tengah.

2.1 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Konsep kebijakan public atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (Rantung 2024). Kebijakan ini tidak hanya mencakup keputusan dan tindakan yang diambil, tetapi juga mencerminkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tindakan yang terencana dan terarah. Kebijakan publik adalah konsep yang kompleks dan sering didefinisikan oleh para ahli dengan beragam perspektif. Berikut adalah ringkasan pengertian kebijakan publik menurut beberapa ahli:

1. Thomas R. Dye: Menurut Dye, kebijakan publik adalah "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (whatever governments choose to do or not to do). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan mencakup tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak, yang keduanya memiliki dampak pada masyarakat (Agustian 2019).
2. Menurut Carl J. Frederick, kebijakan publik dapat dipahami sebagai seperangkat tindakan yang dirancang oleh individu maupun kelompok dalam situasi tertentu, yang di dalamnya

terkandung berbagai peluang serta hambatan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan bukan hanya sekadar gagasan atau rencana, melainkan mencerminkan tindakan nyata yang memiliki maksud dan arah yang jelas. Dengan kata lain, kebijakan publik lebih menekankan pada apa yang benar-benar dilakukan dalam praktik, bukan semata-mata pada apa yang direncanakan atau diusulkan dalam dokumen formal. Oleh karena itu, perilaku yang terarah pada pencapaian tujuan menjadi unsur penting dalam memahami esensi kebijakan publik menurut Frederick..

3. David Easton: Easton menjelaskan kebijakan publik sebagai "alokasi nilai-nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat". Ini menunjukkan bahwa hanya pemerintah yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan yang mempengaruhi masyarakat(Wahab 2022).
4. Nugroho: Menurut Nugroho, kebijakan publik memiliki dua karakteristik utama: pertama, mudah dipahami karena berkaitan dengan tindakan untuk mencapai tujuan nasional; kedua, mudah diukur berdasarkan sejauh mana kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.
5. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang bersifat konsisten dan dilakukan secara berulang oleh para pembuat kebijakan, serta

ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Definisi ini menekankan bahwa konsistensi dalam pengambilan keputusan dan implementasinya merupakan aspek fundamental dalam kebijakan publik. Artinya, sebuah kebijakan tidak hanya dilihat dari satu kali tindakan, tetapi dari pola keputusan yang berkelanjutan yang mencerminkan arah dan tujuan kebijakan secara keseluruhan.(Alapján- 2020).

Keputusan yang dirumuskan dalam kebijakan publik dapat berasal dari lembaga-lembaga resmi pemerintah maupun dari perwakilan institusi yang memiliki kewenangan dalam proses perumusan kebijakan. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan publik mencerminkan kompleksitas proses pengambilan keputusan dalam ranah pemerintahan, yang tidak hanya melibatkan aktor-aktor formal, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang menyertainya. Kebijakan publik juga memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat, sehingga penting untuk memahami konteks, tujuan, serta pelaksanaan dari setiap kebijakan yang diterapkan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan, yaitu proses menjalankan keputusan-keputusan yang telah dirumuskan, umumnya dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau

kebijakan formal lainnya. Menurut Van Metter dan Van Horn, implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintah, dengan tujuan untuk merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Proses ini mencakup berbagai aktivitas administratif, organisasi, dan operasional yang dilakukan setelah kebijakan disahkan, serta sangat bergantung pada interpretasi, sumber daya, dan kondisi lingkungan yang mendukung pelaksanaannya. (Solichin 2019). Proses ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam masyarakat. Implementasi dimulai setelah tujuan dan sasaran kebijakan ditentukan, diikuti dengan penyusunan program kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan (Alaslan 2021). Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain:

1. Komunikasi: Kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi kepada pelaksana sangat penting untuk menghindari distorsi dalam implementasi.
2. Sumber Daya: Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan fasilitas yang memadai sangat menentukan efektivitas implementasi.
3. Disposisi Pelaksana: Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Pelaksana yang memiliki disposisi positif cenderung lebih efektif dalam melaksanakan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi: Organisasi yang jelas dengan prosedur operasional standar (SOP) dapat memperlancar proses implementasi.

Beberapa teori implementasi kebijakan memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Salah satu teori yang relevan adalah teori Korten, yang berfokus pada kesesuaian antara berbagai elemen dalam proses implementasi. Penjelasan singkat mengenai beberapa teori implementasi kebijakan dan rincian lengkap mengenai teori Korten.

1. Teori George C. Edward III: Teori ini menekankan empat variabel kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keberhasilan implementasi tergantung pada seberapa baik informasi disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran, serta ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
2. Teori Van Meter dan Van Horn: Teori ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mereka mengidentifikasi lima variabel yang mempengaruhi efektivitas implementasi: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, dan kondisi lingkungan.
3. Teori Mazmanian dan Sabatier: Teori ini membagi variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi menjadi tiga kelompok: karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan variabel lingkungan.

Keberhasilan implementasi tergantung pada seberapa baik kebijakan dapat mengatasi masalah yang ada dan seberapa mendukung lingkungan eksternal terhadap pelaksanaan kebijakan.

4. Teori Korten, yang dikembangkan oleh David C. Korten, menekankan pentingnya kesesuaian antara tiga elemen dalam implementasi kebijakan atau program:
 - a. Kesesuaian antara Program dan Pemanfaat: Ini mengacu pada seberapa baik program memenuhi kebutuhan kelompok sasaran. Program harus dirancang dengan mempertimbangkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pemanfaat agar dapat memberikan manfaat maksimal.
 - b. Kesesuaian antara Program dan Organisasi Pelaksana: Elemen ini menilai apakah organisasi pelaksana memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang disyaratkan oleh program. Jika organisasi tidak memiliki sumber daya atau keterampilan yang diperlukan, maka pelaksanaan program akan terhambat.
 - c. Kesesuaian antara Kelompok Pemanfaat dan Organisasi Pelaksana: Ini mencakup seberapa baik syarat yang ditetapkan oleh organisasi pelaksana dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran. Jika syarat tersebut terlalu berat atau tidak sesuai dengan kemampuan pemanfaat, maka hasil program tidak akan tercapai.

Dari ketiga elemen dari teori korten diatas dapat kita lihat juga dari beberapa indikator-indikator pendukung dari teori Korten mencakup:

- a. Relevansi Program: Sejauh mana program memenuhi kebutuhan nyata dari kelompok sasaran.
- b. Kemampuan Organisasi: Kapasitas organisasi pelaksana dalam hal sumber daya manusia, finansial, dan teknis untuk melaksanakan program.
- c. Kesesuaian Syarat: Apakah syarat-syarat yang ditetapkan untuk pemanfaat dapat dipenuhi dengan mudah oleh kelompok sasaran.

Pada penelitian ini akan menggunakan teori bottom-up dalam konteks pengembangan kebijakan dan implementasi program merujuk pada pendekatan yang menekankan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan ini berlawanan dengan pendekatan top-down, di mana keputusan diambil oleh pihak yang lebih tinggi tanpa melibatkan masukan dari masyarakat yang terdampak. Teori model yang paling tepat untuk penelitian ini ialah model David C. Korten yang mana menggunakan analisis kesesuaian program yang menekankan pada keberhasilan program, bahwa program akan mencapai tujuan jika terdapat keterkaitan tiga unsur yakni: kesesuaian program dengan pelaksanaan, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksanaan, dan kesesuaian antara kelompok pemanfaatan, dengan organisasi pelaksana lebih dikenal dengan teori David C. Korten (sobirin 2023).

Tujuan dari teori David C. Korten adalah untuk menciptakan sistem implementasi program yang efektif dan efisien melalui kesesuaian antara berbagai elemen yang terlibat, serta memfokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Teori ini menjadi pedoman bagi banyak organisasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik serta program-program pembangunan (Abdurrahman and Suriyani 2022).

2.1.3 Pengembangan Desa Wisata

Menurut Pearce (1995), pengembangan desa wisata merupakan sebuah proses yang berfokus pada upaya untuk membangun dan meningkatkan kualitas desa sebagai destinasi wisata. Proses ini mencakup penyediaan serta penyempurnaan fasilitas dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Sementara itu, Nunung (2021) menegaskan bahwa pengembangan desa wisata melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

Beberapa kriteria penting yang harus dimiliki oleh desa agar dapat dikembangkan menjadi desa wisata antara lain adalah kedekatan dengan objek wisata, potensi lokal yang unik, keterbukaan masyarakat terhadap perubahan, serta aksesibilitas yang memadai. Meskipun potensi alam dan budaya lokal menjadi modal utama, keberhasilan pengembangan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dan

tersedianya fasilitas penunjang, yang hingga kini masih menjadi tantangan utama di banyak daerah. (Raihana and Junaedi 2024). Wiendu (1993) mengemukakan bahwa pengembangan desa wisata adalah upaya untuk meningkatkan keunggulan suatu desa melalui pemberdayaan masyarakat. Ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. (Sudarta 2022)

Menurut Nuryanti (dalam Chafid Fandeli, 2020), desa wisata dipahami sebagai suatu bentuk integrasi antara daya tarik wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukung, yang berpadu dengan kehidupan masyarakat lokal, sehingga menjadikan desa tersebut sebagai destinasi wisata yang otentik. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan pengalaman wisata berbasis alam dan budaya, tetapi juga menghadirkan interaksi langsung dengan keseharian masyarakat desa. Sementara itu, Antara dan Arida (2015) menekankan pentingnya penggalian potensi alam dan budaya lokal sebagai fondasi utama dalam pengembangan desa wisata. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan pengalaman wisata yang khas dan berbeda, yang mampu menarik minat wisatawan dan mendorong keberlanjutan destinasi (Krisnawati, 2021).

a. Tujuan pengembang desa wisata

Pengembangan desa wisata melayani berbagai tujuan, terutama ditujukan untuk meningkatkan ekonomi lokal, mempromosikan warisan budaya, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Inisiatif ini dirancang untuk menciptakan pariwisata berkelanjutan yang

menguntungkan pengunjung dan penduduk. Bagian berikut menguraikan tujuan utama pengembangan desa wisata.

1. Pemberdayaan Ekonomi

- **Generasi Pendapatan:** Desa wisata dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan lokal melalui kegiatan terkait pariwisata, yang secara signifikan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat (Kurniawati, Werdani, and Kholidin 2023).
- **Penciptaan Pekerjaan:** Pembentukan infrastruktur pariwisata menciptakan peluang kerja, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Indratno et al. 2023).

2. Pelestarian Budaya

- **Warisan Budaya:** Desa-desa wisata sering fokus untuk melestarikan dan menampilkan budaya lokal, tradisi, dan praktik kuliner, seperti yang terlihat dalam pengembangan paket wisata budaya (Achyarsyah et al., 2024)].
- **Keterlibatan Masyarakat:** Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pariwisata memastikan bahwa praktik budaya dipertahankan dan dirayakan (Kurniawati et al., 2023).

3. Pembangunan Berkelanjutan

- **Pertimbangan Lingkungan:** Praktik berkelanjutan ditekankan untuk melindungi ekosistem lokal sambil mempromosikan pariwisata(Indratno et al., 2023).
- **Pariwisata Berbasis Masyarakat:** Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif dari penduduk, memastikan bahwa pengembangan pariwisata selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat(Indratno et al., 2023).

b. Manfaat pengembangan desa wisata

1. Manfaat Ekonomi:

Pengembangan desa wisata memberikan peluang peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal melalui berbagai kegiatan ekonomi seperti penyediaan akomodasi homestay, penjualan makanan tradisional, kerajinan tangan, dan jasa pemandu wisata. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran di desa (Kabar desa 2025).

2. Manfaat Sosial-Budaya:

Desa wisata membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal karena wisatawan tertarik untuk mempelajari dan mengalami kehidupan autentik masyarakat desa. Interaksi antara penduduk lokal dan wisatawan juga dapat meningkatkan pemahaman lintas budaya dan memperkuat identitas budaya setempat.

3. Manfaat Lingkungan:

Pengembangan desa wisata yang berkelanjutan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan untuk menarik wisatawan, serta mengelola sumber daya alam secara bijak.

4. Manfaat Infrastruktur:

Hadirnya desa wisata biasanya diikuti dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini tidak hanya menguntungkan sektor pariwisata tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

5. Manfaat Pendidikan:

Desa wisata dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, interaksi dengan wisatawan dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan komunikasi masyarakat desa.

c. Fungsi pengembangan desa wisata

1. Peningkatan Ekonomi Lokal: Desa wisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui penyediaan lapangan kerja, seperti pemandu wisata, penginapan, dan usaha kuliner. Peningkatan wisatawan juga mendorong pertumbuhan bisnis lokal.

2. Pelestarian Budaya: Pengembangan desa wisata sering kali melibatkan promosi budaya lokal, yang membantu masyarakat untuk melestarikan tradisi, seni, dan kearifan lokal. Ini juga mendukung identitas budaya suatu daerah.
3. Konservasi Lingkungan: Dengan pendekatan yang berkelanjutan, desa wisata dapat mendorong konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Edukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat mengurangi dampak negatif dari pariwisata.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Pengembangan desa wisata memberi kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan pengembangan wilayah. Ini meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
5. Peningkatan Infrastruktur: Untuk mendukung pariwisata, infrastruktur seperti jalan, sanitasi, dan fasilitas umum sering diperbaiki atau dibangun. Ini tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
6. Pendidikan dan Kesadaran: Desa wisata dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi pengunjung tentang lingkungan, budaya, dan cara hidup masyarakat setempat. Ini membantu meningkatkan kesadaran akan isu-isu sosial dan lingkungan.

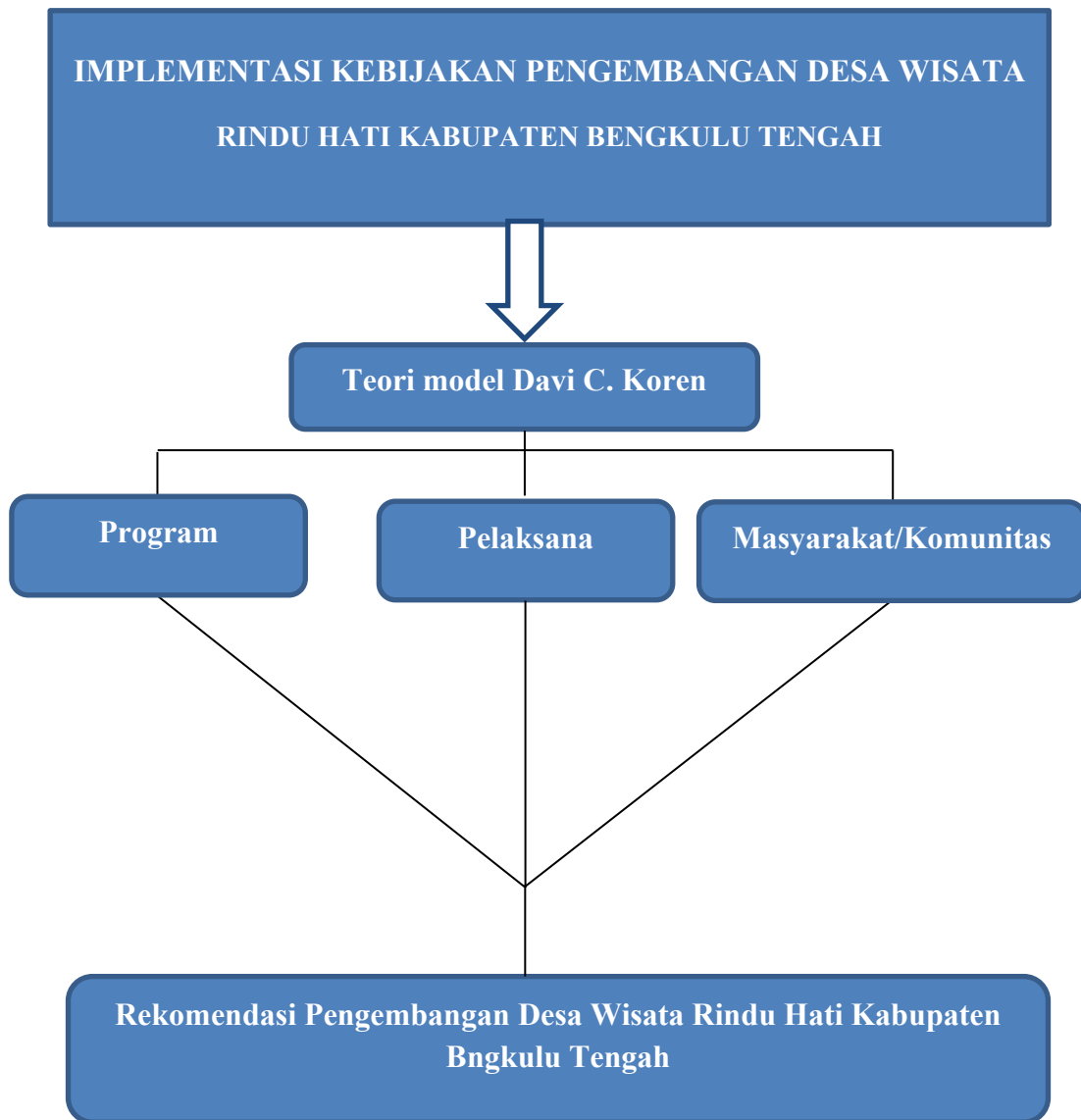
7. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Masyarakat desa dapat mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber, seperti agrikultur, kerajinan tangan, dan pariwisata, yang mengurangi ketergantungan pada satu sektor ekonomi.
8. Pengembangan Jaringan Sosial: Pengembangan desa wisata dapat memperkuat hubungan sosial di antara masyarakat dan antara masyarakat dengan pengunjung, menciptakan jaringan yang mendukung kolaborasi dan solidaritas.

2.2 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan suatu struktur konseptual yang menjelaskan hubungan antara variabel atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kerangka ini disusun berdasarkan kajian pustaka, teori-teori yang relevan, serta temuan dari penelitian terdahulu yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang diangkat. Secara umum, kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan dalam memahami, menganalisis, dan memecahkan permasalahan secara sistematis. Dengan menggunakan konsep, prinsip, dan teori yang sesuai, peneliti dapat menyusun argumen yang logis dan terstruktur guna mengarahkan proses penelitian menuju kesimpulan yang valid.(Nurroh 2017). Kerangka berpikir membantu individu atau kelompok dalam mengatur informasi, mengevaluasi bukti, dan menarik kesimpulan yang logis. Dalam konteks penelitian atau penulisan, kerangka berpikir juga merujuk pada langkah-langkah atau model yang diikuti untuk mencapai tujuan tertentu. Kerangka berpikir adalah buatan kita

sendiri (bukan buatan orang lain), yaitu cara kita berargumentasi dan merumuskan hipotesis.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: David C.Korten